

**MILITER, ICMI DAN KEBANGKITAN KELAS MENENGAH MUSLIM :
RESPON MILITER TERHADAP IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM
INDONESIA**

Akhmad Satori¹

Abstract

ICMI's emergence as a new political force in the political scene in Indonesia, can not be separated from the pros and cons. among the pro, saw a moderate rise of ICMI that may on the one hand as the government's strategy with its interests, but on the other Muslims also have the advantage in it. While among those who behave counter to the criticism that ICMI ICMI when too close to the bureaucracy in fear will strengthen the symptoms of exclusivism and elitism will even damage the roots of Islamic culture that had been painstakingly built. In addition ICMI criticized as a tool for successful elections in order to later re-elected Soeharto to become President.

Military (ABRI), which since the early days of independence until the New Order played an important political role, it also provides a response to the rise of Islamic groups, particularly with regard to the birth of this ICMI.

Key Words: *ICMI, Military, Middle Class, Domocratization*

Abstrak

Munculnya ICMI sebagai suatu kekuatan politik baru dalam kancah perpolitikan di Indonesia, tidak lepas dari pro dan kontra. kalangan yang pro, melihat secara moderat bahwa kemunculan ICMI mungkin di satu pihak sebagai strategi pemerintah dengan kepentingan-kepentingannya, tetapi di pihak lain umat muslim juga mendapat keuntungan di dalamnya. Sedangkan kalangan yang bersikap kontra terhadap ICMI mengkritik bahwa ICMI bila terlalu dekat dengan birokrasi di khawatirkan akan memperkuat gejala eksklusivisme dan elitisme bahkan akan merusak akar budaya Islam yang selama ini susah payah dibangun. Selain itu ICMI dikritik sebagai alat untuk mensukseskan pemilu agar kemudian Soeharto terpilih kembali guna menjadi Presiden.

Militer (ABRI) yang sejak awal kemerdekaan sampai Orde baru memainkan peran politik yang penting, ternyata juga memberikan respon terhadap kebangkitan kelompok Islam, khususnya berkenaan dengan kelahiran ICMI ini.

Kata Kunci: ICMI, Militer, Kelas Menengah, Demokratisasi

PENGANTAR

Peran Islam politik dalam babakan sejarah Indonesia telah mengalami pasang surut sejak masa kemerdekaan hingga sekarang. Hubungan antara Islam dan politik di Indonesia seperti gula dan rasa manisnya, keduanya tidak

¹ Ketua Program studi Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi Tasikmalaya

bisa dipisahkan, jika ada yang bisa memisahkan gula dari rasa manisnya, maka dia akan mampu memisahkan agama Islam dari politik². Deskripsi tersebut didasarkan pada fakta bahwa Islam menempati posisi yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Indonesia. Bukan hanya Islam sebagai agama mayoritas masyarakat muslim, tetapi juga Islam memainkan peran sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kekuatan Islam mulai surut ketika orde baru berkuasa. kelompok-kelompok maupun partai-partai Islam mengalami depolitisasi, sehingga Islam secara politik tidak lagi berperan banyak, kelompok, organisasi dan partai islam “dikebiri” dan berlangsung sampai awal 1990-an.

Dinamika kehidupan politik Indonesia pada awal 1990-an menunjukkan semakin menguatnya proses demokrasi dari bawah,³ hal ini tercermin dari mulai maraknya kelompok-kelompok yang muncul dari bawah, yang mencapai klimaknya pada akhir 1990-an dengan melahirkan gerakan reformasi total yang menyentuh segala aspek baik sosial, politik, ekonomi dan hukum. Di antara kelompok-kelompok tersebut yang paling menyita perhatian adalah dari kelompok Islam yang tampil dengan kekuatan politik baru. Tidak heran kalau pengamat politik Fachry Ali, menyebut kelompok tersebut sebagai “Islam Politik”.⁴ dalam bentuk metamorfosa baru.

Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dalam peta perpolitikan saat itu tidak terlepas dari peran kelompok-kelompok Islam politik tadi, tetapi yang menarik untuk dicermati adalah bahwa ICMI mengambil posisi yang berbeda dengan kelompok-kelompok Islam lainnya, ICMI cenderung mewakili fenomena bersatunya kepentingan Negara dengan kelompok Islam, hal inilah yang kemudian akan mewarnai kehidupan politik nasional.

Menghadapi fenomena tersebut, di mana kelompok Islam mulai berperan dalam kehidupan politik Indonesia, tidaklah mustahil bahwa kelas menengah dan golongan terpelajar Islam mengalami sentuhan kesadaran kelas, posisi dan

² Deskripsi tersebut di kemukakan oleh KH. Wahab Chasbullah, seorang tokoh terkemuka dalam Gerakan nahdatul Ulama pada tahun 1950-an suatu periode ketika politik masa sedang berada di puncak ketinggiannya

³ Lihat Andreas Uhlir, *Democracy and diffusion : Transnational Lesson Drawing among Indonesia Pro-Democracy Actors*, (Sweden : Lund University,1995) dalam Cholisin., *Respon Militer Terhadap Gerakan Pro Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit tiara Wacana, 2002.) hal. 1

⁴ Dalam Fachry Ali, *Keharusan Demokratisasi Dalam Islam Indonesia*, dalam Ali Fauzi Nasrullah, (ed), *ICMI : Antara Status Quo dan Demokratisasi*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1995).,hal. 126

peran yang menjadi momentum kebangkitan kelas menengah Muslim di Indonesia yang selama ini diperjuangkan.⁵

Namun munculnya ICMI sebagai suatu kekuatan politik baru dalam kancah perpolitikan di Indonesia, tidak lepas dari pro dan kontra. kalangan yang pro, melihat secara moderat bahwa kemunculan ICMI mungkin di satu pihak sebagai strategi pemerintah dengan kepentingan-kepentingannya, tetapi di pihak lain umat muslim juga mendapat keuntungan di dalamnya. Sedangkan kalangan yang bersikap kontra terhadap ICMI mengkritik bahwa ICMI bila terlalu dekat dengan birokrasi di khawatirkan akan memperkuat gejala eksklusivisme dan elitisme bahkan akan merusak akar budaya Islam yang selama ini susah payah dibangun. Selain itu ICMI dikritik sebagai alat untuk mensukseskan pemilu agar kemudian Soeharto terpilih kembali guna menjadi Presiden.

Militer (ABRI) yang sejak awal kemerdekaan sampai Orde baru memainkan peran politik yang penting, ternyata juga memberikan respon terhadap kebangkitan kelompok Islam, khususnya berkenaan dengan kelahiran ICMI ini. Pertanyaan yang muncul kemudian mengapa militer memberikan respon negatif terhadap kelahiran ICMI, apa yang menyebabkan hal tersebut?

Tulisan ini bermaksud untuk memberikan sedikit gambaran mengenai bagaimana kompleksitas masalah yang terjadi seputar kebangkitan kelas menengah muslim, terutama dalam mencermati respon militer terhadap kelahiran ICMI dan faksionalisasi yang terjadi dikalangan militer serta pada bagian lain tulisan ini di sedikit di jelaskan mengenai respon militer terhadap ICMI dengan menggunakan analisis ekonomi politik.

ICMI DAN KEBANGKITAN KELAS MENENGAH MUSLIM.

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), berdiri lahir tahun 1990 pada masa akhir rezim Orde Baru. ICMI terbentuk pada mulanya merupakan gagasan dari sejumlah mahasiswa Unibraw di Malang, yang ingin menyelenggarakan simposium dengan mengundang para intelektual muslim dari berbagai latar belakang. Atas dorongan beberapa intelektual mereka diminta untuk membuat sebuah proposal mengenai ikatan cendekiawan muslim Menristek BJ Habibie.

⁵ Lihat dalam Afan Malay, Faktor ICMI menjelang Pergeseran Kekuasaan, dalam Ali Fauzi Nasrullah, (ed), *ICMI : Antara Status Quo dan Demokratisasi*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1995),hal. 196

Pembentukan ICMI tersebut kemudian disetujui oleh Soeharto dan mendapat dukungan kuat dari rezim Orba. Persetujuan Soeharto terhadap pembentukan ICMI melahirkan persepsi bahwa ia sedang memegang "Kartu Muslim"⁶. Bersamaan dengan langkah-langkah akomodatif lain yang dilakukan negara, ICMI terus dilihat sebagai indikasi yang bermakna bahwa keramahan hubungan politik negara dan Islam benar-benar dilembagakan.

Tidak diragukan lagi bahwa kemunculan ICMI sebagai salah satu kekuatan baru dalam khazanah kehidupan politik di Indonesia sangat berpengaruh terhadap posisi tawar umat Islam di Indonesia, mengingat pada masa Orde Baru Islam selalu mengalami marginalisasi bahkan Islam mengalami depolitisasi. Islam hanya berkuat pada wilayah kultural sehingga tidak mempunyai kekuatan politik yang signifikan bahkan Islam cenderung di matikan. Hal ini menjadi ironis karena Islam merupakan agama yang penganutnya paling besar di Indonesia.

Peristiwa politik ini di pandang oleh sebagian pengamat sebagai sebuah strategi yang di kembangkan oleh rezim orde baru untuk merangkul kekuatan Islam yang mulai menemukan momentum kebangkitannya. Kelahiran ICMI di yakini oleh sebagian pengamat sebagai strategi " birokratisasi " Islam, yang arti praktisnya adalah penjinakan umat Islam. Hal ini wajar, mengingat kekuatan pemerintah semakin menurun akibat friksi yang terjadi dengan kalangan militer

Namun yang menarik adalah, beberapa pengamat lain seperti Robert W Hefner dan M. Nakamura,⁷ melihat hal ini sebagai gejala lain. Hefner berpendapat bahwa tidak benar kalau ICMI dibentuk hanya sekedar untuk mensukseskan pemilu 1992, atau mendukung kepemimpinan Soeharto ketika ia tidak lagi mendapat dukungan kuat dari militer. Hefner melihat Soeharto dan birokrasi benar mendapat konsensi politik dari ICMI, tetapi ia juga melihat bahwa ICMI pun mendapat konsensi politik dari pemerintah. Lebih dari itu Hefner tampak percaya bahwa sikap akomodatif kompromis yang di lakukan pemerintah terhadap umat Islam - dengan restunya terhadap ICMI - merupakan buah dari perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat muslim itu sendiri,

⁶ Kartu Muslim merupakan istilah yang di sebutkan oleh Hefner sebagai kekuatan muslim Indonesia suatu kekuatan baru yang diharapkan oleh Soeharto dan Rezim orde Baru setelah semakin ditinggalkan militer.

⁷ Lihat Saiful Mujani, *Kultur Kelas Menengah Muslim dan kelahiran ICMI : Tanggapan terhadap Robert W. Hefner dan Mitsuo Nakamura dalam Ali Fauzi Nasrullah, (ed), ICMI : Antara Status Quo dan Demokratisasi*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1995).,hal. 91

dimana kelas menengah sudah semakin kuat sehingga tidak mungkin diabaikan oleh pemerintah.

Hefner menunjuk kemunculan kelas menengah muslim ini ada hubungannya dengan gerakan keislaman di kampus-kampus perguruan tinggi umum yang kemudian menurutnya merefleksikan keislaman kaum pembaru, dan disanalah proses Islamisasi berlangsung. Untuk mendapatkan gambaran mengenai keislaman kelas menengah ini Hefner banyak bersandar pada persepsi keislaman dari kalangan pembaru itu sendiri dan kemudian di hipotesiskan bahwa keislaman semacam itu lah yang terdapat pada kelas menengah tersebut, dan menentukan pembentukan ICMI.⁸

Dalam analisisnya mengenai kelas menengah, Hefner berpendapat bahwa dalam Indonesia baru, kelas menengah baru sedang mengambil bentuknya di daerah-daerah perkotaan yang sedang berkembang pesat sekarang ini. Universitas umum memainkan peranan yang sangat penting dalam perubahan ini. Disini Hefner menyebut salman ITB sebagai salah satu pos gerakan Islamisasi kampus yang dipimpin oleh Imaduddin Abdurrahim. Gerakan serupa juga muncul di kampus-kampus umum lainnya.⁹

Yang menarik dari pengamatan mengenai kelas menengah, Hefner adalah bahwa kemunculan intelektual muda dari kalangan santri yang mendapatkan pendidikan yang memadai diperguruan tinggi umum tanpa kehilangan identitas keislaman mereka hingga memainkan peranan yang semakin penting di sektor birokrasi ataupun swasta. Karena kelas menengah yang di ukur dari tingkat pendidikan yang diperoleh serta posisi yang diduduki maka Hefner sampai pada kesimpulan bahwa kelas menengah Muslim sekarang telah muncul.

MILITER, ICMI DAN PERUBAHAN KONSTELASI POLITIK

Format politik yang di bangun Orde Baru memperlihatkan kenyataan yang sangat menarik yaitu disain pemerintahan yang didalamnya memberikan peluang amat dominan bagi militer untuk intervensi ke segala sektor kehidupan, terutama sektor birokrasi dan politik. Kehadiran Orde Baru ditopang eksistensi kalangan militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), khususnya Angkatan Darat (AD) dengan tokoh utamanya Soeharto yang

⁸ Hefner, Robert W., *ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1995) hal.32

⁹ Ibid, Saiful Mujani hal.82

melenggang ke tangga puncak kekuasaan setelah dirinya mengklaim Presiden Soekarno telah memberinya mandat pemulihan keamanan, yang dikenal dengan Supersemar (Surat Perintah 11 Maret).

Eep Saefulloh Fatah (1994) memahaminya lewat empat alasan: (1) sebagaimana fenomena umum Dunia Ketiga, militer Orde Baru adalah kekuatan sosial-politik yang paling siap dalam hal organisasi dan skills untuk memasuki birokrasi; (2) keadaan awal Orde Baru, ditandai kecurigaan penguasa terhadap politikus sipil yang umumnya berbasiskan partai politik; (3) penetrasi atau malah penguasaan militer terhadap birokrasi dianggap sebagai strategi paling tepat dalam rangka mengamankan pembangunan dan kelangsungan kekuasaan; (4) penetrasi militer kedalam birokrasi menjadi leluasa karena tiadanya hambatan yang berarti dari masyarakat (awal) Orde Baru yang memang terbukti tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk ikut campur dalam pengaturan birokrasi dan memengaruhi jalannya kebijakan-kebijakan birokratis.

Keterlibatan ke wilayah politik yang makin membesar di era Orde Baru membuat militer tidak hanya dominan, tapi hegemonik. Yang menjadi persoalan ialah (1) militer membatasi demokrasi, yakni dengan melanggengkan sistem politik yang monolitik dan semiotoriter; (2) militer, karena merasa bagian absah dari kekuasaan, melakukan kontrol ketat atas kebebasan masyarakat; (3) militer menjadi alat efektif bagi penguasa untuk mencengkeramkan kepentingan kelanggengan kekuasaannya; (4) tatkala militer dalam praktiknya di lapangan kerap melakukan pelanggaran HAM dan justru menggelisahkan masyarakat. Posisi politik mereka tidak dipersoalkan, kecuali menjelang akhir Orde Baru, ketika terjadinya disharmonisasi hubungan dengan pemerintah.

Memasuki awal 1990 militer melakukan konsolidasi baik dalam jajaran ABRI maupun dengan pemerintah, namun militer tidak merasa puas dengan hasil yang dicapai, salah satu masalah yang hangat di bicarakan dalam kalangan militer pada waktu itu adalah kalangan militer tampaknya kurang antusias terhadap pencalonan kembali Presiden Soeharto, militer cenderung mengharapkan kepemimpinan yang berbeda.

Soeharto menyadari bahwa militer mulai mampu memainkan peran politik terlepas dari kontrolnya dan dukungan terhadapnya mulai menurun. Untuk mengembalikan kemampuan kontrolnya terhadap militer maka Soeharto mulai menjalankan strateginya dengan mengganti pada beberapa posisi penting dalam tubuh ABRI, yaitu dengan mengangkat Jendral Feisal Tanjung sebagai pangab

dan Jenderal Hartono sebagai KSAD, yang keduanya berasal dari keluarga santri dan dekat dengan golongan Islam (ICMI).

Senada dengan pernyataan diatas Hefner (1995),¹⁰ menyatakan pembangkangan yang di lakukan militer menyebabkan Soeharto marah dan ia bertekad memberikan pelajaran kepada pimpinan militer, kebanyakan pengamat menilai bahwa berdirinya ICMI sebagai hukuman Presiden terhadap pimpinan ABRI. Selain itu berdirinya ICMI juga merupakan upaya presiden untuk meraih dukungan dari umat Islam.

Soeharto menganggap bahwa orang Islam yang terorganisir dalam ICMI sebagai sekutu politik yang semakin penting. Pendekatan pemerintah terhadap ICMI tidak disukai oleh pemimpin ABRI. Harold Crouch mengatakan bahwa sikap baik ABRI terhadap ICMI belum tentu meresap kedalam tubuh ABRI yang curiga terhadap organsasi-organisasi Islam yang dianggap berbau neo-Masyumi.¹¹ Ketidak senangan terhadap ICMI karena ICMI yang berdiri pada awal tahun 1990 dengan Habibie sebagai ketua umumnya berasal dari kalangan aktifis muslim yang menjadikan ICMI sebagai kendaraan untuk mendesak tatanan politik baru yang tidak tergantung pada militer dan mencerminkan kepentingan muslim.¹² pernyataan-pernyataan Habibie setelah selesai berbicara di hadapan para perwira militer menunjukkan keinginan adanya tatanan baru di mana sipil mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki kepemimpinan nasional.¹³

Ketegangan yang memanas antara presiden dan militer membantu menjelaskan reaksi keras pimpinan militer terhadap ICMI, sejak dari awal elit-elit militer berembuk untuk mengagalkan disahkannya ICMI. Namun di pihak lain ada beberapa elit-elit militer yang akomodatif dengan ICMI, selain mereka juga telah di rangkul oleh Soeharto sebagai strategi untuk mengimbangi kekuatan militer yang kontra terhadapnya. Maka kemudian terjadi faksionalisasi di tubuh

¹⁰ Dalam Robert W. Hefner, *Civil Islam : Islam dan Demokratisasi di Indonesia*,(Yogyakarta : Penerbit ISAI, 2001) hal. 270

¹¹ Harold Crouch, "ABRI dan Islam", (Tiras, No.4/ Tahun.1, 23 Februari 1995,) hal 59 dalam Cholisin., *Respon Militer Terhadap Gerakan Pro Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit tiara Wacana, 2002.) hal. 68

¹² Cholisin., *Respon Militer Terhadap Gerakan Pro Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit tiara Wacana, 2002.) hal. 68.

¹³ Pernyataan ini di kemukakan oleh Habibie ketika sebagai menristek berbicara di hadapan perwira ABRI pada tanggal 21 September 1996, ceramah dilakukan di markas sasko ABRI Bandung di hadapan para clon siswa sesko ABRI, Seskoad, Sespimpol serta para perwira Garnizun Bandung Cimahi.

militer yang menghasilkan dikotomi militer yang merah-putih dan militer yang hijau.

DIKOTOMI MILITER : ABRI MERAH-PUTIH DAN ABRI HIJAU

Faksionalisme militer yang menghasilkan dikotomi merah putih dan hijau terjadi di awal 1990-an. Meski secara jelas baru tampak pada dekade 1990-an, embrio faksionalisme ini ternyata telah muncul pada era 1980-an. Memang, ketika itu kelompok hijau bisa dikatakan belum menggeliat. Rival kelompok hijau ini bermain sendirian.

Pergantian Pangab dari Edi Sudradjat kepada Feisal Tanjung pada '90-an sempat menimbulkan pertanyaan besar. Saat itu, hanya ada dua perwira tinggi senior yang sedang berebut menggantikan posisi Edi Sudradjat: Feisal Tanjung dan Harsudiono Hartas. Namun keputusan jatuh pada Feisal Tanjung karena Feisal yang memiliki kedekatan dengan kelompok hijau. Sejak itu muncul spekulasi, naiknya Feisal tidak lepas dari peran Habibie, yang saat itu naik daun karena memegang kendali ICMI.

Sementara itu, Soeharto yang masih berbulan madu dengan kelompok Islam ingin memunculkan Habibie yang saat itu memegang jabatan ketua umum ICMI. Soeharto pun marah. Hartas, setelah SU MPR 1993, hanya diberi tempat di DPA, yang sering dipelesetkan menjadi "Dewan Pensiunan Agung". Naiknya Feisal menjadi Pangab kemudian diikuti naiknya Hartono, yang saat itu memegang jabatan gubernur Lemhanas, menjadi Kassospol menggantikan Hartas. Naiknya Hartono ini juga tidak lepas dari konspirasi kelompok Hijau. Sebab, Hartono, ketika masih Pangdam V/Brawijaya, memberikan gerak leluasa untuk ICMI mendeklarasikan diri. Hal ini memberikan petunjuk bahwa kelompok hijau ini mempunyai hubungan khusus dengan ICMI. .

Bila para pengamat militer melihat awal pengelompokan merah putih dan hijau terjadi pada era 1990-an, sebenarnya, masih ada petunjuk lain yang mengindikasikan faksionalisme ini mulai terjadi pada awal 1980-an. Seperti yang ditulis Hartono Mardjono dalam buku Reformasi Politik Suatu Keharusan. Fungsiaris PPP yang sekarang aktif di Partai Bulan Bintang ini menulis pada 1983 bahwa pada saat jaya-jayanya, mereka menguasai kepemimpinan ABRI dan kepala-kepala bidang politik di pemerintahan daerah tingkat I dan II. Juga, posisi-posisi di lembaga intelijen. Kemudian mereka menyerbu dan merebut kepemimpinan Golkar yang ingin mereka jadikan mesin politik. Mereka juga

menggarap FABRI. Hartono menggunakan kata "mereka" untuk merujuk pada kelompok yang terdiri atas orang-orang sipil, birokrat, dan faksi tertentu di tubuh militer yang ingin menguasai kekuasaan.

Sejak awal Orde Baru, kelompok ini menjadi *invisible government* (pemerintah bayangan). Hartono menulis, mereka berhasil menempati pos-pos penting di lingkungan birokrasi dan ABRI. Pos-pos penting dalam ABRI, khususnya pimpinan, komandan-komandan pasukan, dan bidang-bidang intelijen ini mereka kuasai bertahun-tahun. Dia juga mengungkapkan bahwa pada 1983, banyak anggota ABRI yang masih aktif terpaksa dipensiunkan cepat karena harus menjadi fungsionaris Golkar. Gambaran yang ditulis Hartono ini jelas mengindikasikan adanya faksi tertentu di tubuh ABRI yang berbeda dengan ABRI-ABRI lain. Mereka mempunyai tujuan tersendiri.

Hartono mengatakan, istilah ABRI hijau dan ABRI merah putih ini sebenarnya diperkenalkan oleh mereka. Hartono yang pernah menjadi wakil rakyat ini juga menulis, mereka isukan bahwa masuknya cendekiawan dan eksponen-eksponen muslim ke pemerintahan, DPR, MPR, atau ABRI sebagai bahaya Islamisasi. "ABRI merah putih versus ABRI hijau mereka tebarkan untuk memecah belah bangsa dan persatuan ABRI dengan rakyat yang notabene mayoritas muslim," ungkap Hartono. Bagaimana halnya dengan faksionalisme berlatar belakang lain?

Pengamat politik asal Swedia Anders Uhlin¹⁴ menggambarkannya dalam buku berjudul *Indonesia and The Third Wave of Democratization: The Indonesia Pro-Democracy Movement in a Changing World*. Dalam buku yang terbit 1997 ini, Uhlin menulis, mantan Pangab dan Menhankam Jenderal Benny Moerdani dikenal memiliki perselisihan dengan istana kepresidenan. Sejak Benny keluar dari ABRI pada 1988, Soeharto secara teratur ikut campur dalam penunjukan orang-orang kunci di ABRI. Orang-orang yang loyal kepada Moerdani, secara sistematis, telah digantikan oleh orang-orang yang loyal kepada Soeharto. Ini menyebabkan kemarahan di kalangan para perwira. Jelaslah, ada juga pengelompokan antara orang-orang yang ditunjuk Soeharto di satu sisi dan para perwira non-Soeharto di sisi lain.

¹⁴ Lihat buku berjudul *Indonesia and The Third Wave of Democratization: The Indonesia Pro-Democracy Movement in a Changing World*, dalam www.Google.com

RESPON MILITER TERHADAP KELAHIRAN ICMI : ANALISIS EKONOMI POLITIK

Awal keterlibatan militer dalam dunia bisnis bersamaan dengan kelahirannya. Jika pada mulanya militer berbisnis untuk *survive* karena negara tidak mampu memberikan dana yang memadai, yang kemudian terjadi adalah bisnis yang melembaga menjadi fungsi ketiga selain fungsi sosial politik. Tak kurang dari seluruh angkatan darat, laut dan udara, serta kesatuan tempur seperti kopassus, terlibat dalam lahan basah rupiah.

Begitu banyak bidang bisnis yang kemudian di tekuni oleh militer, mulai dari sektor jasa, industri transportasi, perkayuan, perkebunan, HPH, pertambangan, Bank, minyak dan masih banyak lagi.¹⁵ Dalam beberapa periode bisnis yang dilakukan militer terutama angkatan darat terlihat bahwa bisnis mengantarkan beberapa nama kondang seperti, Liem soe Liong, Bob Hasan, Kelompok Cendana, Tommy Winata dan lain sebagainya. Mereka umumnya besar dan dibesarkan melalui bisnis yang dibangun atas dasar kemitraan dengan tentara. Sehingga mampu membuat imperium baru dengan bisnis yang mungkin sama atau berbeda.

Pola hubungan antara politik dan ekonomi di Indonesia cenderung mengarah kepada politisisme. Hal ini ditunjukkan oleh Onghokham¹⁶ yang melihat bahwa sepanjang sejarah bangsa Indonesia ada pola bahwa penguasa baru akan membawa *money man* sendiri. Chatib Basri¹⁷ menunjukkan kecenderungan yang sama khususnya dalam kasus ABRI. Ia menggambarkan kaitan akumulasi kekuasaan dengan kapital sebagai salah satu keunikan Indonesia di bandingkan dengan negara lain. Dalam konsep yang konvensional menurutnya, hubungan kausal antara akumulasi kapital dan kekuasaan lebih difahami dari arah akumulasi kapital bisa mempengaruhi kekuasaan atau kebijakan. Kelompok bisnis yang besar misalnya memiliki kekuatan lobi untuk meminta proteksi. Tapi dalam kasus ABRI akumulasi kapital justru terjadi karena mereka memiliki

¹⁵ Setidaknya ada sekitar 227 perusahaan yang dikelola oleh militer dalam berbagai bidang, oleh karenanya bisnis militer sangat diperhitungkan oleh kompetitor bisnis lainnya. Lihat Mashoodi Norsalim dan Curie Maharani Savitri, "Tentang Militerisme Indonesia" dalam *Negeri Tentara : Membongkar Politik Ekonomi Militer*. (Wacana :Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 17, Tahun III, 2004).hal 191

¹⁶ Onghokham, Elit dan Monopoli dalam Prisma 2 (Jakarta : LP3ES, 1985) hal.13 dalam Cholisin., Respon Militer Terhadap Gerakan Pro Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta : Penerbit tiara Wacana, 2002.) hal. 21

¹⁷ Muhammad Chatib Bisri, Bisnis ABRI : Membuka Kotak Pandora, dalam (Tempo, 16 November 1998, hal 68) dalam Cholisin., Respon Militer Terhadap Gerakan Pro Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta : Penerbit tiara Wacana, 2002.) hal. 22

kekuasaan. Surat keputusan dan lisensi dapat menjadi modal utama berjalannya suatu bisnis.¹⁸

Dengan demikian peran militer dalam politik sangat menguntungkan juga secara ekonomi, sehingga militer berkepentingan untuk mempertahankan kondisi ini. Mac Intyre (1994), menyatakan elemen penting kelangsungan kekuatan militer mendukung orba karena mereka berkepentingan untuk mempertahankan *status quo* yang berupa keluasan dalam mempengaruhi politik dan penghargaan ekonomi yang substansial.

Gerakan-gerakan yang di timbulkan dari kelas bawah dan adanya upaya kebangkitan kelas menengah muslim, seperti dengan lahirnya ICMI jelas menginginkan adanya perubahan kehidupan politik yang lebih terbuka. Demokratis dapat dilihat sebagai ancaman terhadap kepentingan politik dan ekonomi militer. Sehingga dalam pandangan militer kesadaran politik kelas bawah dan munculnya kelas menengah baru dari kalangan muslim dapat mengurangi kekuatan politik militer dalam meningkatkan kepentingannya.

Dengan demikian, dari perspektif analisis ekonomi politik militer sebagai upaya menjelaskan respon militer terhadap ICMI khususnya dan kebangkitan kelas menengah muslim pada umumnya, dapat dijadikan sebagai salah satu analisis untuk melihat bagaimana respon militer terhadap kebangkitan kelas menengah muslim.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat kita ketahui, sekiranya bahwa selama konstelasi politik yang terjadi awal tahun 1990-an, ada banyak peristiwa penting yang terjadi dalam peta perpolitikan di Indonesia, kebangkitan kelas menengah muslim yang menemukan momentumnya dengan lahirnya ICMI adalah salah satu peristiwa penting yang patut di cermati. Namun di sinilah kompleksitas permasalahan mulai memanas, kelahiran ICMI ternyata menimbulkan respon yang berbeda-beda, sebagian kalangan ada yang bersikap pro dan sebagian lain ada yang kontra, diantara pihak yang kontra terhadap ICMI adalah lembaga militer yaitu ABRI. Respon militer yang bersifat negatif terhadap tuntutan perubahan politik ekonomi oleh kelas menengah Islam seperti yang telah di paparkan diatas menunjukkan bahwa militer berusaha melindungi kepentingan ekonomi politiknya yang telah didapatkannya selama ini.

¹⁸ Ibid, Chaolisin... hal. 22

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Fauzi Nasrullah, (ed), *ICMI : antara Status Quo dan Demokratisasi*, Bandung : Penerbit Mizan, 1995
- Cholisin., *Respon Militer Terhadap Gerakan Pro Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit tiara Wacana, 2002.
- Cipto, Bambang., *Partai, Kekuasaan dan Militerisme*, Yogyakarta : Penerbit : pustaka Pelajar, 2000.
- Dalam, *Negeri Tentara : Membongkar Politik Ekonomi Militer*, Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 17 Tahun III 2004, Yogyakarta : Insist Press, 2004.
- Efendi, Bachtiar, *Masyarakat Agama dan Prulalisme Keagamaan :Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani dan Etos Kemanusiaan*, Yogyakarta, Galang Press, 2001.
- Fatah, R. Eep Saefulloh, *Masalah dan prospek demokrasi di Indonesia*. Jakarta Ghalia Indonesia, 1994.
- Hefner, Robert W., *ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1995.
-, *Civil Islam : Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit ISAI, 2001
- Saiful Mujani, *Kultur Kelas Menengah Muslim dan kelahiran ICMI : Tanggapan terhadap Robert W. Hefner dan Mitsuo Nakamura dalam Ali Fauzi Nasrullah, (ed), ICMI : Antara Status Quo dan Demokratisasi, (Bandung : Penerbit Mizan, 1995).*
- Qadir, Zuly dan Lalu M Iqbal Songell (ed), *ICMI : Negara dan Demokratisasi, Catatan Kritis Kaum Muda*, Yogyakarta : Kelompok Studi Lingkaran, 1995.